Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi
eISSN 3089-8374 & pISSN 3090-1022
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/p1742f93
Hal. 4680-4690

Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/ekopedia

Implementasi Kegiatan Sensus Ekonomi dan Pengolahan Data Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri

Lupita Ulul Azmi[1], Calista Zaima Abida[2], Ainun Jannatin[3], Hima Widyas Asmara[4]
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia[1, 2, 3]
Dosen Pembimbing Lapangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia[4]

*Email ululasmi543@gmail.com, calistazaima09@gmail.com, ainunjannatin619@gmail.com, widyahima09@gmail.com

Diterima: 04-11-2026 | Disetujui: 11-11-2026 | Diterbitkan: 13-11-2026

ABSTRACT

The 2026 Economic Census (SE2026) provides information on the number, distribution, and characteristics of business units that underpin development planning, while Statistics Indonesia (BPS) is responsible for ensuring data quality through data processing. This study aims to describe the implementation of the Economic Census and statistical data processing at BPS Kediri Regency, identify the obstacles encountered and how they were addressed, and formulate recommendations for improvement. The study employed a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, documentation, and literature review, then analyzed using an interactive model and validated through source and technique triangulation. The findings show that SE2026 was carried out in three interrelated stages: preparation and coordination, field enumeration by 1,532 officers across 26 sub-districts, and data processing using the FASIH application. Processing obstacles included anomalies in business data entries, technical problems in API-based data cleaning, and the management of physical documents such as maps. The study concludes that careful, staged census implementation and data processing, supported by checking and validation, contribute to accurate, complete, and accountable data, including for sharia economic analysis at the regional level.

***Keywords**: BPS Kediri Regency; Data processing; Data validation; Economic census; FASIH.*

ABSTRAK

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menyediakan informasi mengenai jumlah, persebaran, dan karakteristik unit usaha yang menjadi dasar perencanaan pembangunan, sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) berperan menjaga mutu data tersebut melalui tahap pengolahan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kegiatan Sensus Ekonomi dan pengolahan data statistik di BPS Kabupaten Kediri, mengidentifikasi kendala beserta upaya penanganannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif melalui studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis dengan model interaktif dan diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SE2026 berlangsung dalam tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu persiapan dan koordinasi, pendataan lapangan oleh 1.532 petugas di 26 kecamatan, serta pengolahan data menggunakan aplikasi FASIH. Kendala pengolahan data meliputi anomali isian data usaha, hambatan teknis pembersihan (cleaning) data berbasis API, dan pengelolaan dokumen fisik seperti peta. Disimpulkan bahwa pelaksanaan sensus dan pengolahan data yang cermat, bertahap, serta disertai pemeriksaan

dan validasi mendukung tersedianya data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk bagi analisis ekonomi syariah di tingkat daerah..

Kata Kunci: *BPS Kabupaten Kediri; FASIH; Pengolahan data; Sensus ekonomi; Validasi data.*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azmi, L., Zaima Abida, C., Jannatin, A., & Asmara, H. W. . (2026). Implementasi Kegiatan Sensus Ekonomi dan Pengolahan Data Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *2*(4), 4680-4690. https://doi.org/10.63822/p1742f93

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah memerlukan data yang akurat, terpercaya, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat, karena data menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menempatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik dasar, termasuk sensus yang dilaksanakan secara berkala. Salah satunya adalah Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997). Sensus Ekonomi menjadi sumber informasi utama mengenai jumlah, persebaran, dan karakteristik unit usaha yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah maupun nasional (Elsa, Dian Arevina, Puput Iswandyah Raysharie, 2026)

Mutu data sensus tidak hanya ditentukan oleh cakupan pencacahan, tetapi juga oleh kualitas proses pada setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, pengolahan data, hingga validasi hasil (Elsa, Dian Arevina, Puput Iswandyah Raysharie, 2026). Kesalahan kecil pada penginputan dan pengecekan data dapat memengaruhi kualitas informasi statistik yang dihasilkan (Nabila et al., 2026). Ashari dan Kamdan (2026) juga menemukan bahwa volume data yang besar menuntut ketelitian dalam entri, pemeriksaan, dan validasi agar data akurat dan konsisten (Ashari, 2026). Pada SE2026, hasil pencacahan diolah melalui aplikasi FASIH sehingga petugas pengolahan harus teliti memeriksa, memperbaiki, dan memvalidasi data, serta mengelola dokumen fisik pendukungnya.

Kondisi tersebut tampak jelas di BPS Kabupaten Kediri selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 1 September sampai 30 Oktober 2026. Berdasarkan catatan kegiatan harian, kendala pengolahan data dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. *Pertama*, anomali isian data usaha pada FASIH, yaitu nama usaha yang tidak sesuai, galat (*error*) aplikasi, rincian pilihan yang tidak tersedia, ketidaksesuaian jumlah pekerja laki-laki dan perempuan dengan total pekerja dibayar dan tidak dibayar, serta penyesuaian kode KBLI, nilai aset, biaya produksi dan operasional, dan NIK. *Kedua*, hambatan teknis pada *cleaning* data berbasis API, berupa kegagalan pemrosesan berulang, status *pending*, dan keterlambatan pemrosesan. *Ketiga*, kendala pengelolaan dokumen, yaitu kelengkapan dan jumlah dokumen per kecamatan yang perlu dicek ulang, hasil pemindaian peta yang kurang jelas sehingga harus diulang, proses *scanning* yang lambat karena alat pemindai sudah lama, serta risiko dokumen tercampur antarkelompok. Kendala-kendala ini menyita sebagian besar hari kerja selama PPL dan menunjukkan bahwa ketelitian prosedural menjadi penentu mutu data.

Permasalahan ini berkaitan dengan bidang ekonomi syariah. Kajian ekonomi syariah di tingkat daerah, seperti pemetaan potensi UMKM, pengembangan zakat dan wakaf produktif, serta perumusan kebijakan keuangan syariah, memerlukan data usaha yang valid, misalnya jenis usaha, tenaga kerja, aset, dan biaya. Data semacam itu dihasilkan melalui sensus ekonomi, sehingga mutu pengolahan data sensus menentukan kualitas analisis ekonomi syariah yang bersandar padanya. Mahasiswa ekonomi syariah perlu memahami proses ini agar mampu menilai kelayakan data yang dipakai dalam analisis.

Kajian terdahulu mengenai kegiatan statistik di BPS umumnya berbentuk laporan pengalaman magang. Nabila et al. (2026) menggambarkan keterlibatan mahasiswa di BPS Kota Palangka Raya dalam sensus ekonomi, pengolahan data dengan aplikasi Matcha Pro, serta analisis kemiskinan, harga emas, dan IHP-NTP, dan menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut meningkatkan pemahaman alur kerja dan

kemampuan pengolahan data mahasiswa (Nabila et al., 2026). Pada instansi yang sama, Elsa et al. (2026) melaporkan bahwa sensus ekonomi menghadapi keterbatasan waktu pendataan, kesulitan menjangkau responden, dan dokumen yang belum lengkap, sehingga validasi data perlu dilakukan lebih teliti. Sejalan dengan itu, Ashari dan Kamdan (2026) melaporkan bahwa pendampingan pengolahan dan validasi data di BPS Kabupaten Sukabumi membantu meningkatkan akurasi dan konsistensi data statistik serta memperlancar proses pengolahan (Ashari, 2026).

Terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi di lapangan. Secara ideal, pengolahan data berjalan sesuai standar operasional melalui tahap entri, pemeriksaan, dan validasi sehingga data akurat dan konsisten (Ashari, 2026), dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan validasi hasil pada setiap tahap (Elsa, Dian Arevina, Puput Iswandyah Raysharie, 2026). Namun, di BPS Kabupaten Kediri, anomali data masih berulang di berbagai rincian isian, proses otomatis berbasis API belum selalu berhasil, dan pengelolaan dokumen fisik masih bergantung pada alat dan pemeriksaan manual. Penelitian terdahulu di atas berfokus pada pengalaman belajar mahasiswa, kendala pencacahan, dan peningkatan akurasi data secara umum, sedangkan kendala spesifik pada pengolahan data dan pengelolaan dokumen SE2026 belum dianalisis secara rinci. Artikel ini berbeda karena menelaah pengolahan data pada FASIH SE2026 di BPS Kabupaten Kediri, mencakup penanganan anomali, hambatan *cleaning* berbasis API, dan pengelolaan dokumen peta serta PSLS, lengkap dengan upaya penanganan dan rekomendasinya, serta menghubungkannya dengan kebutuhan data bagi analisis ekonomi syariah.

Pembahasan ini mendesak karena data SE2026 akan dirujuk dalam jangka panjang, sehingga kekeliruan pada tahap pengolahan akan terbawa ke seluruh analisis kebijakan. Rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana implementasi kegiatan pengolahan data dan pengelolaan dokumen SE2026 di BPS Kabupaten Kediri; (2) apa saja kendala yang dihadapi selama pengolahan data pada aplikasi FASIH SE2026 dan pengelolaan dokumen sensus, serta bagaimana upaya penanganannya; dan (3) bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengolahan data statistik pada sensus dan survei berikutnya. Karena pendekatannya deskriptif-kualitatif, artikel ini tidak merumuskan hipotesis. Tujuan penulisan adalah mendeskripsikan implementasi pengolahan data dan pengelolaan dokumen SE2026, mengidentifikasi kendala beserta penanganannya, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menggambarkan secara mendalam proses implementasi kegiatan Sensus Ekonomi dan pengolahan data statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah serta aktivitas yang berlangsung di lingkungan penelitian. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa BPS Kabupaten Kediri merupakan instansi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut didukung oleh publikasi resmi BPS Kabupaten Kediri mengenai

koordinasi persiapan dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama pemerintah daerah serta instansi terkait.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pegawai serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sensus ekonomi dan pengolahan data statistik. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumen kelembagaan, pedoman pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan statistik, dokumentasi, serta publikasi resmi Badan Pusat Statistik yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) sumber data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai sumber, baik secara langsung maupun melalui dokumen pendukung. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan yang diteliti (Sugiyono, 2019). Informan penelitian meliputi pegawai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi, petugas pengolahan data statistik, serta petugas lapangan atau pengawas yang memahami proses pendataan dan pemeriksaan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pelaksanaan kegiatan statistik dan proses pengolahan data di lingkungan BPS Kabupaten Kediri. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai tahapan kegiatan, pembagian tugas, kendala, serta upaya penyelesaian permasalahan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti pendukung berupa laporan, pedoman kerja, dan arsip kegiatan. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang relevan dengan penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut bertujuan memperoleh informasi yang mendalam dan saling melengkapi sesuai dengan fokus penelitian (Hardani et al., 2020).

Analisis data menggunakan model interaktif , yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta memverifikasi kesesuaian informasi yang diperoleh. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang memiliki keterlibatan berbeda dalam kegiatan statistik. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan berbagai sumber bukti dalam penelitian studi kasus dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan ketelitian hasil penelitian .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan bahwa implementasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Kediri berlangsung dalam tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu persiapan dan koordinasi, pendataan lapangan, serta pengolahan data statistik. Ketiga tahap tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu rangkaian kerja yang berkesinambungan. Kualitas persiapan memengaruhi kelancaran pencacahan di lapangan, sedangkan kualitas pencacahan menentukan mutu data yang diolah pada tahap akhir. SE2026 merupakan

sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan siklus pelaksanaan sepuluh tahun sekali. Siklus ini dimaksudkan agar pemerintah memiliki potret terbaru mengenai struktur, sebaran, dan karakteristik kegiatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari usaha berskala besar hingga usaha mikro dan kecil. Pelaksanaannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengatur bahwa sensus diselenggarakan secara berkala (Radio Republik Indonesia, n.d.). Landasan hukum ini memberikan kepastian bagi BPS dalam menjalankan kegiatan, sekaligus menegaskan pentingnya kesediaan pelaku usaha untuk memberikan data yang diminta. Secara nasional, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Jadwal tersebut berlaku serentak di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Kediri, sehingga BPS kabupaten perlu mengatur waktu dan sumber daya agar target pendataan dapat tercapai dalam periode yang telah ditetapkan.

Pada tahap persiapan, Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan dukungan terhadap sensus karena hasilnya dipandang sebagai dasar pemetaan potensi daerah dan penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menempatkan sensus bukan sekadar kegiatan administratif milik BPS, melainkan kebutuhan bersama. Data sensus dapat dimanfaatkan untuk mengetahui sektor usaha yang berkembang, wilayah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi, serta kelompok usaha yang memerlukan pembinaan. Dukungan ini dilengkapi dengan rapat koordinasi pemerintah kabupaten, yang dimanfaatkan Kepala BPS Kabupaten Kediri untuk menjelaskan urgensi, tahapan, dan strategi pelaksanaan sensus. Rapat koordinasi tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi, membuka ruang dukungan lintas sektor, dan memastikan pemerintah kecamatan maupun desa memahami peran masing-masing. Dengan koordinasi yang baik, petugas di lapangan diharapkan memperoleh kemudahan akses, penerimaan yang lebih baik dari masyarakat, dan dukungan informasi mengenai wilayah kerja mereka.

Pada tahap pendataan, BPS menerjunkan 1.532 petugas ke 26 kecamatan, dan pencacahan dilakukan dari pintu ke pintu secara berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten (BPS Kabupaten Kediri, n.d.-b). Metode pencacahan langsung dari pintu ke pintu dipilih agar petugas dapat memastikan keberadaan usaha secara faktual, mengamati kegiatan usahanya, dan memperoleh keterangan langsung dari pemilik atau pengelola usaha. Jumlah petugas yang cukup besar dan penyebarannya ke seluruh kecamatan menunjukkan bahwa pendataan dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah, baik kawasan perkotaan yang padat kegiatan usaha maupun wilayah perdesaan yang karakter usahanya lebih beragam. Sifat pencacahan yang berkelanjutan juga memberi kesempatan bagi petugas untuk mengunjungi kembali usaha yang belum sempat ditemui, sehingga cakupan pendataan dapat ditingkatkan.

Pada tahap pengolahan, BPS menggunakan teknologi digital dalam pengumpulan data sehingga hasil pencacahan dapat langsung terintegrasi ke dalam sistem. Pemanfaatan teknologi ini mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, mempersingkat alur penyampaian data dari lapangan ke pusat pengolahan, dan memungkinkan pemantauan kemajuan pendataan secara lebih cepat. Selain itu, BPS memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses pengolahan data SE2026. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan membantu proses pemeriksaan, pengelompokan, dan penyajian data sehingga hasil sensus dapat tersedia lebih cepat untuk dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan dua catatan penting. Pertama, pendataan pelaku usaha sektor digital menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Usaha di sektor ini umumnya tidak memiliki lokasi fisik

yang tetap, sehingga lebih sulit ditemukan dan diidentifikasi melalui pencacahan langsung dari pintu ke pintu. Hal ini menuntut petugas untuk lebih kreatif dan teliti dalam menelusuri keberadaan usaha tersebut. Kedua, mutu data sensus sangat dipengaruhi oleh kejujuran dan keakuratan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada petugas. Secanggih apa pun teknologi yang digunakan, hasil pengolahan data tetap bergantung pada kebenaran data yang dimasukkan sejak awal. Oleh karena itu, kesadaran pelaku usaha untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat menjadi faktor penentu keberhasilan sensus, di samping kesiapan petugas dan dukungan pemerintah daerah.

1. Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Sensus

Persiapan SE2026 dilakukan jauh sebelum pencacahan lapangan dimulai. Jeda waktu yang panjang antara persiapan dan pelaksanaan menunjukkan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan berskala besar yang tidak dapat dijalankan secara tergesa-gesa. Sensus ini mencakup seluruh unit usaha di seluruh wilayah Indonesia, sehingga setiap komponen, mulai dari konsep dan definisi, kuesioner, aplikasi pengumpulan data, hingga sumber daya manusia, harus dipastikan siap sebelum petugas turun ke lapangan. BPS menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dan administrasi persiapan pada November 2024, kemudian melaksanakan uji coba lapangan secara bertahap untuk menguji instrumen dan prosedur kerja. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman mengenai pembagian tugas, jadwal, dan standar kerja antarjenjang organisasi. Adapun uji coba lapangan yang dilakukan bertahap memungkinkan BPS menemukan kelemahan pada kuesioner, kendala penggunaan aplikasi, maupun hambatan prosedural sebelum pelaksanaan sebenarnya, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih awal.

Tahap ini menunjukkan bahwa mutu data sensus tidak hanya ditentukan saat pencacahan, tetapi juga oleh kesiapan instrumen, prosedur, dan petugas sejak awal. Instrumen yang kurang jelas akan menimbulkan perbedaan tafsir antarpetugas, prosedur yang tidak seragam akan menghasilkan data yang sulit dibandingkan, dan petugas yang kurang siap berpotensi melakukan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, investasi waktu dan tenaga pada tahap persiapan pada dasarnya merupakan upaya menjaga kualitas data di tahap-tahap berikutnya. Pelatihan instruktur nasional untuk pendataan lengkap juga dilakukan agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama sehingga data yang dihasilkan akurat dan mutakhir (BPS Provinsi Jawa Tengah, n.d.). Pelatihan berjenjang seperti ini memungkinkan materi diteruskan dari instruktur nasional hingga ke petugas pencacah di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan pemahaman yang tetap seragam, sehingga interpretasi konsep di Kabupaten Kediri tidak berbeda dengan daerah lain.

Di Kabupaten Kediri, kesiapan tersebut tercermin dari keterlibatan pemerintah daerah. Keterlibatan ini penting karena pemerintah daerah memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan dan desa yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan sensus. Rapat koordinasi pemerintah kabupaten dimanfaatkan BPS untuk menyampaikan tujuan, tahapan, dan strategi sensus kepada perangkat daerah (BPS Kabupaten Kediri, n.d.-a). Penyampaian informasi ini membuat perangkat daerah memahami manfaat sensus bagi perencanaan pembangunan, sehingga mereka dapat berperan aktif, misalnya dengan membantu menyosialisasikan kegiatan kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing serta mendukung

kelancaran tugas petugas di lapangan. Langkah ini sejalan dengan tahap Koordinasi, Komunikasi, dan Diplomasi (KKD) yang juga ditempuh BPS di daerah lain, yaitu menjalin dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sebelum pendataan dimulai. Melalui KKD, BPS tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga membangun hubungan yang saling percaya dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini relevan karena sensus ekonomi menyasar pelaku usaha yang beragam latar belakangnya, sehingga penerimaan terhadap petugas sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan pemahaman mereka terhadap tujuan sensus.

Tahap ini menentukan keberhasilan sensus karena cakupannya mencakup seluruh unit usaha, dari perusahaan besar hingga usaha rumahan. Setiap jenis usaha memiliki karakteristik dan kekhawatiran yang berbeda: perusahaan besar mungkin mempertanyakan kerahasiaan data, sedangkan pelaku usaha rumahan mungkin merasa usahanya terlalu kecil untuk didata. Pendekatan komunikasi yang tepat diperlukan agar semua kelompok bersedia memberikan keterangan. Tanpa dukungan perangkat daerah dan pemahaman masyarakat, petugas berisiko menemui penolakan atau keraguan ketika mendatangi pelaku usaha. Penolakan tersebut dapat menurunkan cakupan pendataan, memperlambat pencacahan, dan pada akhirnya memengaruhi kelengkapan data yang dihasilkan. Dengan demikian, tahap persiapan dan koordinasi dapat dipandang sebagai fondasi bagi seluruh rangkaian kegiatan SE2026, karena keberhasilan pendataan lapangan dan pengolahan data sangat bergantung pada kualitas persiapan yang dilakukan sejak awal.

2. Pelaksanaan Pendataan Lapangan

Pendataan SE2026 di Kabupaten Kediri dimulai dengan menerjunkan 1.532 petugas ke 26 kecamatan. Jumlah petugas yang besar ini mencerminkan luasnya cakupan sensus, karena seluruh unit usaha didata tanpa terkecuali. Dengan jumlah tersebut, setiap petugas dapat memperoleh wilayah kerja yang proporsional sehingga beban pencacahan terbagi merata dan target penyelesaian pendataan dalam jadwal yang ditetapkan dapat dicapai. Pendataan dilakukan dari pintu ke pintu dan terus berjalan di seluruh wilayah kabupaten (BPS Kabupaten Kediri, n.d.-b). Metode ini memungkinkan petugas bertemu langsung dengan pemilik atau pengelola usaha, mengamati kegiatan usahanya, dan mengajukan pertanyaan sesuai kuesioner, sehingga keterangan yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan data yang dikumpulkan dari jauh.

Metode ini dipilih karena kegiatan ekonomi kini tidak hanya berlangsung di bangunan usaha, tetapi juga pada usaha rumahan dan ekonomi kreatif yang menghasilkan pendapatan. Usaha semacam ini sering tidak memiliki papan nama atau tempat usaha yang terpisah dari rumah tinggal, sehingga mudah terlewat apabila pendataan hanya mengandalkan daftar usaha yang sudah ada. Dengan mendatangi setiap lokasi secara langsung, kemungkinan usaha informal tidak tercatat dapat diperkecil. Kelengkapan cakupan ini penting karena usaha mikro dan informal merupakan bagian besar dari struktur ekonomi daerah, dan keberadaannya perlu terpotret agar kebijakan yang disusun tidak hanya berpihak pada usaha berskala besar.

Tantangan khas yang muncul pada sensus kali ini adalah pendataan pelaku usaha sektor digital. BPS Kota Kediri, sebagai pembanding dari wilayah yang berdekatan, menyebut pendataan sektor ini sebagai salah satu tantangan SE2026. Hal seperti ini wajar karena usaha berbasis daring umumnya tidak memiliki toko atau papan nama yang mudah dikenali oleh petugas, sehingga pencacahan membutuhkan

strategi yang lebih adaptif. Petugas perlu lebih teliti menggali informasi dari warga sekitar, menanyakan kegiatan usaha daring pada setiap rumah tangga yang dikunjungi, dan memahami konsep usaha digital agar tidak keliru mengklasifikasikannya. Pendataan tersebut penting karena SE2026 bertujuan menangkap perubahan perilaku masyarakat pascapandemi yang membentuk struktur ekonomi baru. Jika usaha digital tidak terdata, gambaran ekonomi daerah akan kurang lengkap, dan kebijakan yang disusun berpotensi tidak mencerminkan kondisi riil perekonomian.

3. Pengolahan Data Statistik

Pengolahan data adalah tahap yang mengubah hasil pencacahan menjadi data statistik yang siap dianalisis dan dipublikasikan. Data mentah dari lapangan belum dapat langsung digunakan karena masih mungkin memuat isian yang kosong, tidak konsisten, atau salah kode. Karena itu, pengolahan berfungsi sebagai tahap penjaminan mutu sebelum data dimanfaatkan oleh pengguna. BPS menggunakan teknologi digital pada pengumpulan data SE2026, (BPS Kabupaten Kediri, n.d.-a) sehingga isian dari petugas dapat langsung masuk ke sistem dan kebutuhan entri manual berkurang. Kondisi ini mempersingkat alur data dari lapangan ke pusat pengolahan, mengurangi risiko kesalahan input, dan memungkinkan pemantauan kemajuan pendataan secara lebih cepat. Penggunaan teknologi ini membantu BPS menangani data dalam jumlah besar dari seluruh unit usaha. BPS juga memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses pengolahan data SE2026. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan dan pengelompokan data sehingga hasil sensus dapat tersedia lebih cepat.

Secara umum, pengolahan data sensus meliputi beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut adalah pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi isian, pengkodean klasifikasi lapangan usaha, validasi data, dan penyusunan tabulasi. Pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi memastikan seluruh pertanyaan terisi dan jawaban tidak saling bertentangan. Pengkodean klasifikasi lapangan usaha mengelompokkan setiap usaha ke dalam kategori yang baku agar dapat dibandingkan antarwilayah dan antarwaktu. Validasi data menguji kewajaran isian, misalnya dengan menelusuri nilai yang tampak ekstrem atau tidak masuk akal. Terakhir, penyusunan tabulasi menyajikan data dalam bentuk tabel yang siap digunakan untuk analisis dan publikasi. Uraian ini merupakan analisis penulis berdasarkan praktik pengolahan data statistik dan belum bersumber dari dokumen resmi BPS Kabupaten Kediri.

4. Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri memandang SE2026 sebagai dasar pemetaan potensi daerah dan penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Kepala BPS bahwa sensus merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian. Dengan demikian, data sensus memberi gambaran yang lebih lengkap tentang jumlah, jenis, dan sebaran usaha di Kabupaten Kediri, yang dapat dipakai pemerintah daerah untuk menentukan sektor yang perlu diprioritaskan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk mengidentifikasi kecamatan dengan konsentrasi usaha tertentu, menentukan sasaran pembinaan usaha mikro dan kecil, serta merencanakan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi (BPS Kabupaten Kediri, n.d.-b).

Namun, manfaat tersebut baru tercapai apabila data yang dihasilkan akurat. Ketepatan data sangat bergantung pada kejujuran dan keakuratan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada petugas. Data

yang keliru akan menghasilkan perencanaan yang keliru pula, sehingga anggaran dan program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, peran masyarakat sebagai responden sama pentingnya dengan peran petugas dan pengolah data. Sosialisasi yang meyakinkan pelaku usaha bahwa data mereka digunakan untuk kepentingan statistik dan pembangunan perlu terus dilakukan agar partisipasi tetap tinggi. Dengan kepercayaan tersebut, pelaku usaha akan lebih terbuka memberikan keterangan, sehingga data SE2026 benar-benar dapat menjadi landasan yang andal bagi pembangunan Kabupaten Kediri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan dan koordinasi, pendataan lapangan, serta pengolahan data statistik. Pelaksanaan sensus didukung oleh koordinasi dengan pemerintah daerah, keterlibatan petugas di seluruh kecamatan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Penggunaan teknologi tersebut membantu mempercepat alur pengolahan dan pemantauan data sehingga proses pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih efektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SE2026 masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pendataan usaha sektor digital yang sulit diidentifikasi, ketepatan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, serta pemeriksaan dan validasi data. Selain itu, keberhasilan pengolahan data tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketelitian petugas, kelengkapan informasi, dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dan validasi data secara cermat, penguatan koordinasi, serta sosialisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan.

Pelaksanaan SE2026 dan pengolahan data statistik memiliki peran penting dalam menyediakan informasi mengenai jumlah, jenis, karakteristik, dan persebaran unit usaha di Kabupaten Kediri. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan potensi ekonomi, penentuan sasaran pembinaan usaha, perencanaan pembangunan daerah, serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, ketelitian dalam setiap tahapan pelaksanaan sensus dan pengolahan data perlu terus ditingkatkan agar data ekonomi yang dihasilkan akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari, M. R. (2026). *Pendampingan Pengolahan dan Validasi Data Statistik dalam Mendukung Pelayanan Data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi*. *4*(3), 3238–3242.

BPS Kabupaten Kediri. (n.d.-a). Dukungan Sensus Ekonomi 2026 pada Rakor Pemerintah Kabupaten Kediri. *Kedirikab.Bps.Go.Id*. Retrieved https://kedirikab.bps.go.id/en/news/2026/07/02/238/dukungan-sensus-ekonomi-2026-pada-rakor-pemerintah-kabupaten-kediri.html

BPS Kabupaten Kediri. (n.d.-b). Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Ketua DPRD Kabupaten Kediri. *Kedirikab.Bps.Go.Id*. Retrieved https://kedirikab.bps.go.id/en/news/2026/06/23/235/pendataan-sensus-ekonomi-2026-ketua-dprd-kabupaten-kediri.html

BPS Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). Kawal Kualitas SE2026, BPS Gelar Pelatihan Instruktur Nasional Pendataan Lengkap. *Jateng.Bps.Go.Id*. Retrieved https://jateng.bps.go.id/id/news/2026/02/13/1123/kawal-kualitas-se2026--bps-gelar-pelatihan-instruktur-nasional-pendataan-lengkap.html

Elsa, Dian Arevina, Puput Iswandyah Raysharie, D. T. (2026). *Pengalaman dan Implementasi Kegiatan Statistik Selama Magang di Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya*. *5*(2), 6670–6679. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8978

Hardani, Andriani, H., & Ustiawaty, J. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.

Nabila, N., Arevina, D., & Raysharie, P. I. (2026). *Implementasi Kegiatan Sensus Ekonomi dan Pengolahan Data Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya*. *5*(2), 7086–7094.

Radio Republik Indonesia. (n.d.). BPS Natuna Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026. *RRI.Co.Id (RRI Ranai)*. Retrieved https://rri.co.id/ranai/info-kementerian/2236700/bps-natuna-siap-gelar-sensus-ekonomi-2026

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed). Alfabeta.